

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN LINGKUNGAN
BIROKRASI TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN : STUDI
EMPIRIS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh:

**IFRA ZACHRAND 'ATHAYA
NPM. 1902110111**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2025**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 06 Maret 2025

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

IFRA ZACHRAND 'ATHAYA
NPM. 1902110111

Dengan judul:

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN LINGKUNGAN BIROKRASI
TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN: STUDI EMPIRIS PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI KOTA BANDA ACEH**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Budi Safatul Anam, SE., M.Si
NIK. 19740607 201709 1 001

Pembimbing I

Syamsidar, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19730921 199901 2 001

Pembimbing II

Ermad MJ, SE, M.Si
NIK. 19870616 201608 1 001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi,

Dr. H. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si.,MM
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA

TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092

BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 06 Maret 2025

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

IFRA ZACHRAND 'ATHAYA
NPM. 1902110111

Dengan judul:

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN LINGKUNGAN BIROKRASI
TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN: STUDI EMPIRIS PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI KOTA BANDA ACEH**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal, 12 Februari 2025

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Dr. H. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Syamsidar, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19730921 199901 2 001

Anggota

Dr. H. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Anggota

Rusnaldi, SE., M.Si
NIK. 19790615 200507 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Budi Safatul Anam, S.E., M.Si., Ak
NIK. 19740607 201709 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 06 Maret 2025
Yang Menyatakan



IFRA ZACHRAND 'ATHAYA

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ifra Zachrand 'Athaya
NPM : 1902110111
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN LINGKUNGAN BIROKRASI TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN: STUDI EMPIRIS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI KOTA BANDA ACEH.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 06 Maret 2025

Banda Aceh, 06 Maret 2025.
Yang Menyatakan



IFRA ZACHRAND 'ATHAYA

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Dengan segala keterbatasan, pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki, rampungnya penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Bantuan dan dukungan tersebut berupa bimbingan dan arahan, kesediaan waktu dan memberikan kesempatan, kesediaan berdiskusi dan berbagi pengetahuan, berbagi referensi, dan pengalaman, serta dukungan motivasi dan doa. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada:

- 1) Bapak Dr. H. Aslam Nur, M.A, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh, dan Bapak Dr. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M, selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
- 2) Bapak Budi Safatul Anam, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
- 3) Bang Abrar Habibi, S.Si, dan Bang Reza Juli Amri, S.E., selaku Bagian Administrasi Program Studi yang banyak sekali membantu, mengarahkan, memudahkan dan memberikan pelayanan dengan ikhlas.
- 4) Ibu Cut Fitrika Syawalina, S.E., M.Si, selaku Ketua Laboratorium Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
- 5) Ibu Syamsidar, S.E., M.Si., Ak., dan Bapak Ermad M.J., SE, M.Si, selaku dosen pembimbing I & II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya masing-masing dan telah membimbing dengan sangat baik, sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan cepat.

- 6) Seluruh dosen pengasuh mata kuliah pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
- 7) Ibunda Syarifah Fakhrah dan Ayahanda Ibnu Aulia tercinta. Dengan perjuangan dan air mata akhirnya saya berhasil sekolah jenjang S-1, dan Gelar Sarjana ini saya persembahkan untuk Keluarga saya.
- 8) Saudari Nadhira, kak vika, bang gilang, bang topik, kak bella, opal, fatur, irsyad, dappa yang selalu memberi semangat dan motivasi mulai dari teman-teman Program Studi Akuntansi yang sangat memahami dengan memberi ruang dan waktu untuk penulis menyelesaikan penelitian ini. Serta semua pihak yang telah berperan langsung maupun tidak langsung terhadap penyelesaian penulisan skripsi ini saya ucapkan banyak terimakasih.

Akhirnya penulis memohon maaf karena tidak dapat menyebut semua nama dalam lembaran ini, semoga Allah membalas kebaikan saudara semua, *Amin ya Rabbal 'alamin*.

Banda Aceh, 06 Maret 2025

Penulis,

IFRA ZACHRAND 'ATHAYA
NPM 1902110111

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Atas izin-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN LINGKUNGAN BIROKRASI TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN : STUDI EMPIRIS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI KOTA BANDA ACEH”.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam pembangunan dan pelayanan publik, setiap tahun anggaran SKPD di Kota Banda Aceh akan terlibat dalam perencanaan dan penyusunan anggaran. Kemudian rencana anggaran tersebut dilaksanakan dan dicairkan untuk berbagai kebutuhan yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Pada akhir tahun SKPD di Kota Banda Aceh juga harus mempertanggungjawabkan anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan, skala prioritas serta peraturan yang berlaku.

Skripsi ini disusun secara sistematis, diawali dari pendahuluan; kajian kepustakaan, kerangka pemikiran, dan hipotesis; metode penelitian; hasil penelitian dan pembahasan, serta diakhiri dengan kesimpulan, keterbatasan dan saran. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 06 Maret 2025

Penulis,

IFRA ZACHRAND ‘ATHAYA
NPM 1902110111

**THE INFLUENCE OF BUDGET PLANNING AND
BUREAUCRATIC ENVIRONMENT ON BUDGET
ABSORPTION: AN EMPIRICAL STUDY ON REGIONAL
WORK UNITS (SKPD) IN BANDA ACEH CITY**

By:

IFRA ZACHRAND 'ATHAYA
NPM. 1902110111

ABSTRACT

This study examines the influence of budget planning and bureaucratic environment on budget absorption in Regional Work Units (SKPD) of Banda Aceh City. Budget absorption is a key indicator of the effectiveness and success of public sector programs and activities. The research employs a quantitative approach using multiple linear regression analysis to test the relationship between budget planning, bureaucratic environment, and budget absorption. Data collection was carried out using structured questionnaires distributed to SKPD officials directly involved in financial management processes. The findings demonstrate that both budget planning and bureaucratic environment have significant and positive effects on budget absorption, both partially and simultaneously. Effective budget planning ensures the timeliness and precision of program implementation, while a supportive bureaucratic environment facilitates better coordination and minimizes administrative delays. This study provides critical insights for local governments to enhance the efficiency of budget management and improve public service delivery, ultimately contributing to better public welfare.

Keywords: Budget Planning, Bureaucratic Environment, Budget Absorption, SKPD, Public Sector Programs

PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN LINGKUNGAN BIROKRASI TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN : STUDI EMPIRIS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI KOTA BANDA ACEH

Oleh

IFRA ZACHRAND 'ATHAYA
NPM. 1902110111

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banda Aceh. Penyerapan anggaran merupakan indikator kunci efektivitas dan keberhasilan program serta kegiatan sektor publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda untuk menguji hubungan antara perencanaan anggaran, lingkungan birokrasi, dan penyerapan anggaran. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur yang disebarakan kepada pejabat SKPD yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, baik secara parsial maupun simultan. Perencanaan anggaran yang efektif memastikan ketepatan waktu dan presisi pelaksanaan program, sedangkan lingkungan birokrasi yang mendukung memfasilitasi koordinasi yang lebih baik dan meminimalkan hambatan administratif. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dan pelayanan publik, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Perencanaan Anggaran, Lingkungan Birokrasi, Penyerapan Anggaran, SKPD, Program Sektor Publik

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kegunaan Penelitian	8
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
2.1 Landasan Teoritis	9
2.1.1 Anggaran Sektor Publik.....	9
2.1.1.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik.....	9
2.1.1.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik.....	11
2.1.2. Penyerapan Anggaran.....	15
2.1.2.1 Pengertian Penyerapan Anggaran	15
2.1.2.2 Faktor-faktor Yang Menentukan Penyerapan Ang- garan.....	17
2.1.2.3 Indikator Penyerapan Anggaran	18
2.1.3 Perencanaan Anggaran.....	19
2.1.3.1 Pengertian Perencanaan.....	19
2.1.3.2 Tujuan Perencanaan Anggaran	20
2.1.3.3 Indikator Perencanaan Anggaran.....	21
2.1.4 Lingkungan Birokrasi.....	22
2.1.4.1 Pengertian Birokrasi	22
2.1.4.2 Lingkungan Birokrasi Pemerintah.....	23
2.1.4.3 Indikator Lingkungan Birokrasi	24
2.2 Penelitian Sebelumnya	24
2.3 Kerangka Pemikiran	31
2.3.1 Hubungan Perencanaan Anggaran dengan Penyerapan Ang- garan	31
2.3.2 Hubungan Lingkungan Birokasi dengan Penyerapan Angg- aran.....	31
2.3.3 Hubungan Perencanaan Anggaran dan Lingkungan Birokrasi dengan Penyerapan Anggaran.....	32
2.4 Hipotesis.....	34

BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Desain Penelitian	35
3.1.1 Sifat Studi.....	35
3.1.2 Jenis Investigasi	35
3.1.3 Tingkat Intervensi Penelitian Terhadap Studi.....	35
3.1.4 Situasi Studi.....	36
3.1.5 Unit Analisis	36
3.1.6 Horizon Waktu.....	36
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	37
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	38
3.4 Definisi dan Operasional Variabel.....	39
3.4.1 Penyerapan Anggaran	41
3.4.2 Lingkungan Birokrasi	42
3.4.3 Perencanaan Anggaran.....	43
3.5 Teknik Analisis Data.....	43
3.5.1 Pengujian Validalitas dan Rehabilitas	43
3.5.1.1 Pengujian Validalitas	43
3.5.1.2 Pengujian Rehabilitas	44
3.5.2 Analisis Presepsi Responden	44
3.5.3 Regresi Linier Berganda.....	45
3.6 Pengujian Hipotesis	46
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 48
4.1 Hasil Penelitian.....	48
4.1.1 Karakteristik Responden	48
4.1.1.1 Jenis Kelamin.....	48
4.1.1.2 Status Perkawinan	48
4.1.1.3 Usia Responden.....	49
4.1.1.4 Pendidikan Terakhir	49
4.1.2 Persepsi Responden terhadap Variabel	50
4.1.2.1 Persepsi Responden terhadap Perencanaan Anggaran (X1).....	50
4.1.2.2 Persepsi Responden terhadap Lingkungan Birokrasi (X2)	52
4.1.2.3 Persepsi Responden terhadap Penyerapan Anggaran (Y).....	53
4.1.2.4 Statistik Deskriptif.....	53
4.1.3 Hasil Pengujian Instrumen.....	55
4.1.3.1 Uji Validitas	55
4.1.3.2 Uji Reliabilitas.....	56
4.1.3.3 Analisis Skala Likert	57
4.1.3.4 Hasil Analisis Uji Regresi Linear Berganda	58
4.1.3.5 Uji Hipotesis.....	59
4.1.3.6 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama.....	59

4.1.3.7 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua	60
4.1.3.8 Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga	61
4.2 Pembahasan.....	61
4.2.1 Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran	61
4.2.2 Pengaruh Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran	62
4.2.3 Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Lingkungan Birokrasi secara Bersama Terhadap Penyerapan Anggaran .	64
BAB V PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Target Dan Realisasi Anggaran Belanja Pemerinah Kota Banda Tahun Anggaran 2020-2022	3
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	27
Tabel 3.1 Populasi dan Sampel	37
Tabel 3.2 Susunan Skala Liket	39
Tabel 3.3 Operasionalisasi dan Indikator Variabel	39
Tabel 3.4 Persepsi Bedasarkan Likert Skor	45
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Jenis Kelamin	48
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Status Perkawinan	48
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Usia	49
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Tingkat Pendidikan	49
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif	50
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas	52
Tabel 4.7 Reliabilitas Variabel Penelitian	53
Tabel 4.8 Interpretasi Nilai Rata-Rata Tanggapan Responden	54
Tabel 4.9 Persepsi Responden Variabel Perancangan Anggaran	56
Tabel 4.10 Persepsi Responden Variabel Lingkungan Birokrasi	57
Tabel 4.11 Persepsi Responden Variabel Penyerapan Anggaran	58
Tabel 4.12 Hasil Regresi Linear Berganda	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pengejawantahan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik (Yamin, 2022:79). Secara normatif, proses penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dalam mewujudkan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. RKPD tersebut merupakan kumpulan dari seluruh program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diwujudkan dalam bentuk rencana sasaran strategi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan format tersebut maka penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah menjadi stimulus dalam meningkatkan tanggung jawab dan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan negara di seluruh Indonesia.

Penyerapan anggaran adalah tindak lanjut dari rencana anggaran sesuai dengan alokasi dana yang tertuang didalam APBN atau APBD. Penyerapan anggaran menjadi ukuran yang menyatakan seberapa jauh target rencana yang dicapai oleh pemerintah melalui organisasi perangkat daerah dalam bentuk nilai uang. Penyerapan anggaran juga dapat diartikan sebagai proporsi anggaran yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan program atau kebijakan yang dilakukan suatu pemerintahan (Furqana dan Dian, 2022).

Kota Banda Aceh merupakan salah satu perangkat daerah otonom di Indonesia yang melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang dipimpin oleh seorang Walikota Banda Aceh dan membawahi 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 25 Dinas, 5 Badan, 2 Kantor dan 5 Sekretariat (Kantor Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, 2023). Dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam pembangunan dan pelayanan publik, setiap tahun anggaran SKPD di Kota Banda Aceh akan terlibat dalam perencanaan dan penyusunan anggaran. Kemudian rencana anggaran tersebut dilaksanakan dan dicairkan untuk berbagai kebutuhan yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Pada akhir tahun SKPD di Kota Banda Aceh juga harus mempertanggungjawabkan anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan, skala prioritas serta peraturan yang berlaku.

Anggaran pemerintah daerah Kota Banda Aceh yang direncanakan dan dialokasikan untuk pelaksanaan rencana /program kerja pemerintah di 32 SKPD menjadi instrument kebijakan yang penting untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Kota Banda Aceh. Namun berbagai masalah telah terjadi sehingga tingkat realisasi anggaran sebagaimana terlihat dalam LAKIP tidak seluruhnya dapat tercapai secara efektif. Rencana dan realisasi anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun
Anggaran 2020-2022

Tahun	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)
2020	1,371,173,195,544	1,251,360,137,222	91,26%
2021	1.332.172.790.386	1.207.614.088.958	90.65%
2022	1.410.626.047.131	1.334.504.795.398	94.60%

Sumber: LKjip Pemerintah Kota Banda Aceh 2020-2022

Tabel 1.1 menjelaskan tingkat penyerapan anggaran belanja pemerintah Kota Banda Aceh selama tahun 2020 dan 2022 relatif berfluktuasi sejalan dengan kualitas anggaran yang direncanakan serta kemampuan dan upaya SKPD dalam melaksanakan program kerja secara efektif. Selama tahun 2020 dan 2022 tingkat penyerapan anggaran pemerintah Kota Banda Aceh sudah dapat dikatakan efektif dengan tingkat penyerapan anggaran rata-rata melebihi dari 85%. Tahun 2020 tingkat penyerapan anggaran pemerintah Kota Banda Aceh telah mencapai 91,26%. Setelah mengalami penurunan 90,65% pada tahun 2021, tingkat penyerapan anggaran pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2022 kembali meningkat dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai 94,60%.

Perencanaan adalah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (UU No. 25 Tahun 2004). Perencanaan anggaran merupakan salah satu tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah di SKPD Kota Banda Aceh. Dalam melaksanakan program kerja/ kegiatan pemerintah, semua SKPD di Kota Banda Aceh harus menyusun dan mengajukan rencana anggaran yang sistematis

berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Fungsi perencanaan dalam pengelolaan keuangan daerah membuat semua SKPD di Kota Banda Aceh memiliki arah kegiatan ke depan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Dengan menyusun dan mengajukan rencana kerja anggaran maka Bagian/Bidang Kerja, maupun Seksi dan Subbagian di sejumlah SKPD di Kota Banda Aceh akan memiliki pedoman kerja serta target-target yang harus dicapai berdasarkan waktu dan kegiatan instansi diwaktu yang akan datang.

Adanya kecenderungan mengajukan usulan anggaran yang lebih besar dari yang dibutuhkan dengan anggapan bahwa usulan tersebut nantinya tidak akan disetujui semua. Kemudian lemahnya kemampuan pejabat daerah dalam membuat perencanaan yang berkualitas serta adanya kecenderungan pejabat daerah untuk memperbesar alokasi anggaran untuk belanja pegawai sering membuat SKPD di Kota Banda Aceh menghadapi tindakan revisi terhadap DIPA. Kondisi tersebut kemudian menyebabkan jadwal kegiatan harus dilakukan penyesuaian, dan waktu pelaksanaan menjadi mundur. Akibatnya kegiatan dan program kerja belum dapat dilaksanakan sebelum persetujuan revisi DIPA tersebut disahkan, karena kegiatan dan program tersebut dapat dikategorikan belum ada alokasi anggaran akhirnya sering terjadi sisa anggaran yang tidak sempat lagi digunakan pada akhir tahun (Ratag et al., 2019).

Perencanaan anggaran yang berkualitas dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, tidak hanya memberi dampak dan manfaat bagi pembangunan daerah dan kemakmuran masyarakat, namun akan mempermudah SKPD dalam melaksanakan program kerja anggaran dan program kegiatan yang telah

direncanakan. Perencanaan yang berkualitas, prioritas dan berpihak pada masyarakat juga akan membuat Badan Legislatif di Kota Banda Aceh akan dapat lebih cepat melakukan penetapan dan mengesahkan APBD sebagai rekapitulasi program kerja anggaran yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Kondisi tersebut akan dapat menghilangkan hambatan teknis yang sering terjadi dalam pelaksanaan anggaran oleh SKPD di Kota Banda Aceh akibat adanya revisi anggaran. Perencanaan anggaran yang akurat dalam arti mudah di capai juga akan memudahkan tahap pelaksanaan anggaran oleh SKPD dan memungkinkan tercapainya target secara efektif. Sebaliknya, ketidaktepatan dalam perencanaan, akan mengakibatkan sulitnya pelaksanaan anggaran yang berdampak pada lambatnya proses pelaksanaan dan penyerapan anggaran. Perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran (Ratag et al., 2019).

Pelaksanaan anggaran merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan pejabat daerah di SKPD di Kota Banda Aceh untuk merealisasikan semua rencana dari program kerja anggaran termasuk didalamnya adalah pengadaan barang dan jasa. Kegiatan ini melibatkan birokrasi yang panjang sejak dari proses pengadaan barang dan jasa, pengajuan dan pengeluaran Surat Perintah Membayar (SPM) di lingkungan birokrasi SKPD, pengajuan dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana SP2D di lingkungan birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh hingga kas daerah di cairkan oleh masing-masing bendaharawan pada bank pemerintah yang di tunjuk. Kondisi, situasi dan budaya kerja yang terjadi

dalam lingkungan birokrasi pemerintah tersebut akan berpengaruh terhadap pencairan anggaran.

Lingkungan birokrasi pemerintah di Kota Banda Aceh memiliki budaya dan perilaku kerja yang membuat pelaksanaan anggaran sering dihadang oleh persoalan-persoalan teknis, struktural maupun situasional seperti keterlambatan penetapan surat keputusan tenaga pengelola keuangan, buruknya perilaku kerja birokrasi seperti kebiasaan menunda-nunda pekerjaan dalam tahapan administrasi karena keinginan untuk memperoleh penghasilan tambahan dari kegiatan proyek yang dilaksanakan. Kemudian kehati-hatian pejabat dalam mengambil tindakan dalam proses pengadaan barang/jasa serta keengganan pegawai ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta masalah-masalah administrasi lainnya yang ditimbulkan oleh situasi kerja akan membuat jadwal pelaksanaan anggaran akan terganggu dan menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran (Ratag, et al., 2019).

Berdasarkan uraian masalah sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menganalisis secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran: Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Banda Aceh.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi berpengaruh secara simultan terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Banda Aceh?
2. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Banda Aceh?
3. Apakah lingkungan birokrasi berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi secara simultan terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh perencanaan anggaran secara parsial terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Banda Aceh .
3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh lingkungan birokrasi secara parsial terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Banda Aceh.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Memberikan informasi aktual bagi masyarakat ilmiah berkenaan dengan penelitian lanjutan dan pengembangan ilmu akuntansi sektor publik melalui tersedianya bahan referesi yang berkaitan dengan pengaruh perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran.

2. Praktis

- a. Memberikan suatu keputusan yang aktual bagi pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan penyerapan anggaran dengan dukungan perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi yang lebih baik.
- b. Meningkatkan kemampuan aplikasi teori yang lebih baik bagi penulis.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada pengaruh variabel perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran dengan objek penelitian adalah pejabat daerah dan bendahrawan yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Anggaran Sektor Publik

2.1.1.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahap yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2018:75).

Pada ilmu ekonomi pada umumnya, anggaran didefinisikan sebagai pernyataan kuantitatif rencana suatu estimasi dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja dalam suatu periode tertentu. Anggaran menurut NCGA (*National Committee on Goversimental Accounting*) dalam Hartoto et al., (2023:129) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Mardiasmo (2018:76) menjelaskan anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari organisasi publik meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas.

Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi publik di masa yang akan datang.

Anggaran sektor publik menurut Fauzan (2020: 37) didefinisikan sebagai rencana kegiatan dan keuangan dalam periode tahunan yang berisi program dan kegiatan instansi pemerintah dengan jumlah dana yang diperoleh (penerimaan/ pendapatan) dan jumlah dana yang dibutuhkan (pengeluaran/ belanja) dalam mencapai tujuan pemerintah. Lebih lanjut Hartoto et al., (2023:131) menjelaskan anggaran sektor publik adalah anggaran sektor publik merupakan perencanaan keuangan tentang perkiraan penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan data anggaran masa lalu. Untuk dapat dikatakan anggaran sektor publik harus mereleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat serta adanya penentuan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah atau pemerintah daerah.

Menurut Yuliani (2019:27) anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai estetika kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran financial. Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan, namun juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Kemudian Nurkholis dan Khusaini (2019:1) penganggaran Sektor Publik menjelaskan konsep penganggaran dan anggaran adalah penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan dan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat. tahap penganggaran menjadi sangat

penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang disusun.

Hantono et al., (2021:40) anggaran sektor publik adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Anggaran adalah proses pengalokasian sumber daya untuk permintaan yang tidak terbatas. Pada entitas sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik.

Menurut Hartoto et al., (2023:131) anggaran sektor publik tersebut pada umumnya memiliki beberapa karakteristik adalah:

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4. Usulan anggaran di telaah dan disetujui oleh pihak yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran
5. Sekali disetujui anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2.1.1.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Penganggaran dalam sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan penuh dengan nuansa politik, karena anggaran sektor publik merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislative atas penggunaan dana publik untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan lainnya (Sujatmika, 2020: 2). Dengan demikian anggaran sektor publik mempunyai

beberapa fungsi utama: 1. Sebagai alat perencanaan 2. alat pengendalian 3. alat kebijakan fiskal 4. alat politik 5. alat koordinasi dan komunikasi 6. alat penilaian kinerja 7. alat motivasi (Nurkholis dan Khusaini, 2019:6).

Anggaran memiliki fungsi yang multidimensional dalam organisasi. Menurut Fauzan (2020:37) fungsi anggaran secara umum dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3. Anggaran sebagai alat kebijaksanaan fiskal Pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atau penggunaan dana publik.
5. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan.
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pencapaian anggaran.
7. Anggaran sebagai alat untuk emotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomi, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, artinya masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik

Lebih jelas Hantono et al., (2021:43) menjelaskan secara luas fungsi anggaran sektor publik adalah:

1. Anggaran sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a. merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan
- b. merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan
- c. mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun
- d. menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi

2. Anggaran sebagai Alat Pengendali (*control tool*)

Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan – pemborosan pengeluaran. Anggaran

sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif.

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*Fiscal Tool*)

Anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.

4. Anggaran sebagai Alat Politik (*Political Tool*)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan, yaitu sebagai bentuk komitmen eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, coalition bulding, keahlian bernegosiasi dan pemahaman prinsip manajemen keuangan sektor publik.

5. Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*coordination and communication tool*)

Anggaran publik merupakan alat koordiansi antar bagian, terlihat ketika penyusunan anggaran. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.

6. Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Toll*)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai

berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

7. Anggaran sebagai Alat Motivasi (*Motivasi Tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan

2.1.2 Penyerapan Anggaran

2.1.2.1 Pengertian Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan program atau kebijakan yang dilakukan suatu pemerintahan. Tingkat penyerapan anggaran pemerintah pusat dan daerah selalu menjadi topik utama yang sering dijadikan sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi (Furqana dan Dian, 2022).

Penyerapan anggaran dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu (Okniafita dan Dian, 2022). Menurut Ramadhani dan Mia (2019) penyerapan anggaran adalah pencapain dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Masyarakat umum menyebutnya dengan pencairan anggaran.

Secara sederhana penyerapan anggaran menurut Yanuriza et al (2019) adalah membandingkan pagu anggaran yang telah ditetapkan dengan anggaran yang telah direalisasikan. Mardiasmo (2009) dalam Ramopolii et al (2022)

mengatakan penyerapan anggaran adalah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan, dimana penyerapan anggaran pemerintah daerah merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing SKPD.

Menurut Rahayu (2020) penyerapan anggaran pada satuan kerja adalah proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Penyerapan anggaran yang akuntabel dan memenuhi prinsip *value of money* merupakan salah satu penerapan praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadi ukuran kinerja pemerintah. Kemudian Kuncoro dalam Harahap (2020) mengatakan penyerapan anggaran yaitu “suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target rencana yang telah dicapai oleh instansi”

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja dalam Elim et al., (2018) menyebutkan penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator evaluasi kinerja atas aspek implementasi. Penyerapan anggaran merupakan salah satu unsur akuntabilitas keuangan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Fajar dan Muhammad (2017) mengatakan Penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggung jawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan, dimana penyerapan anggaran pemerintah daerah merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. Secara sederhana penyerapan anggaran dapat diartikan membandingkan pagu anggaran yang telah ditetapkan dengan anggaran yang telah direalisasikan.

Menurut Urbinas (2020) penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan. Dengan pertimbangan ini maka kemampuan menyerap anggaran oleh pemerintah daerah dapat menjadi indikator kinerja pemerintah kota/kabupaten.

2.1.2.2 Faktor-Faktor yang Menentukan Penyerapan Anggaran

Keterlambatan penyerapan anggaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi penyerapan anggaran diantaranya meliputi kesiapan satuan kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan, pemahaman satuan kerja dalam mekanisme pelaksanaan pencairan anggaran, proses dalam pengadaan barang dan jasa dan berbagai faktor internal lainnya (Nugroho dan Salman, 2017).

Gagola *et al* (2017) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan anggaran
- b. Pelaksanaan anggaran.
- c. Pengadaan barang jasa
- d. Komitmen manajemen
- e. Lingkungan birokrasi.

Rerung *et al.*, (2018) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran adalah sebagai berikut

1. Komitmen Manajemen

2. Lingkungan Birokrasi
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia
4. Pelaksanaan e-procurement

Kemudian Yanuriza et al., (2019) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada instansi pemerintah terdiri dari:

1. Perencanaan Anggaran
2. Pencatatan Administrasi
3. Sumberdaya Manusia
4. Komitmen Organisasi
5. Lingkungan Birokrasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran menurut Elim, et al (2018) adalah sebagai berikut:

1. Dokumen perencanaan anggaran
2. Pelaksanaan anggaran
3. Dokumen pengadaan barang dan jasa
4. Komitmen manajemen
5. Lingkungan Birokrasi

2.1.2.3 Indikator Penyerapan Anggaran

Indikator yang digunakan terhadap penyerapan anggaran menurut Noviwijaya, Rohman (2013) dan Suhartono (2011) yang dikutip dalam Fajar dan Muhammad (2017). adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran;
2. Konsistensi dalam pelaksanaan program/ kegiatan;

3. Ketepatan jadwal penarikan anggaran

2.1.3 Perencanaan Anggaran

2.1.3.1 Pengertian Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dari aktivitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui perencanaan pemerintah daerah dapat mengetahui apa saja yang harus dikerjakan dan disediakan dalam program kerja instansi. Perencanaan menurut Ratag et al., (2019) merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya kegiatan yang mungkin dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya

Kemudian menurut Hadiutomo (2021:35), perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan tertentu, oleh siapa, dan bagaimana. Perencanaan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Robbins dan Coulter dalam Tisnawati dan Saefullah (2018:98) mendefinisikan perencanaan adalah sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi.

Zarinah dalam Harahap (2020) perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan,

belanja, dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Perencanaan anggaran menurut Alumbida dan David (2017) adalah proses pendefinisian tujuan, penentuan strategi untuk mencapai tujuan, dan pengembangan serangkaian rencana komprehensif untuk menggabung dan mengkoordinasi berbagai aktivitas. Perencanaan anggaran adalah proses penyusunan RKA- SKPD dasar penyusunan APBD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD setelah APBD tersebut ditetapkan. Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, perencanaan berintergrasi dengan penganggaran sebab *output* dari perencanaan adalah DPA yang menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan selama tahun anggaran.

UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan menurut Arif et.al (2019:517) terbagi dalam perencanaan fisik dan pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan fisik

Mengenai hal-hal yang akan digunakan atau dihasilkan, baik material maupun barang-barang jasa.

b. Perencanaan pembiayaan

Mengenai jumlah anggaran yang diperlukan dan besarnya masing-masing kebutuhan anggaran.

2.1.3.2 Tujuan Perencanaan

Perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk suatu jangka

waktu tertentu. Tidak adanya perencanaan penggunaan anggaran secara riil tentu akan berdampak pada munculnya sejumlah kesulitan dalam mengarahkan penggunaan anggaran dengan tepat sasaran. Kemudian Mardiasmo (2018:79) menjelaskan anggaran sebagai alat perencanaan di gunakan untuk:

- a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
- b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternative sumber pembiayaannya.
- c. Mengalokasikan dana pada berbagai program kerja/kegiatan yang telah disusun, dan
- d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2.1.3.3 Indikator Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran menurut Syarah, Fitri (2016) dalam Harahap (2020) menggunakan 6 indikator yaitu, komprehensif, terperinci, disiplin, fleksibel, prioritas, keterbukaan.

Kemudian unsur-unsur perencanaan yang dapat dijadikan indikator perencanaan menurut Arif et.al (2019:516) adalah Tujuan-tujuan, Kebijakan, Prosedur, Pengembangan, Program kerja.

Perencanaan anggaran menurut Gagola et al (2017) diukur dengan indikator penyusunan RKA, penetapan rancangan APBD, penetapan APBD. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan anggaran menurut Hadiutomo (2021:35) adalah:

- a) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat,

- b) Kinerja yang ingin dicapai.
- c) Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan
- d) Harga satuan yang rasional.

2.1.4 Lingkungan Birokrasi

2.1.4.1 Pengertian Birokrasi

Secara etimologi birokrasi berasal dari istilah “buralist” yang kemudian dikembangkan menjadi “bureaucracy” yang akhir akhir ini ditandai dengan cara-cara kerja yang rasional, impersonal dan leglistik. Istilah Birokrasi berasal dari bahasa Perancis “bureau” yang berarti kantor atau meja tulis; dan dari bahasa Yunani “cratein” yang berarti mengatur”. (Ningsih et al., 2023: 50)

Temalagi dan Korneles (2021) menjelaskan birokrasi merupakan aturan pejabat (rule by officials), sebuah alat atau mekanisme yang dibuat untuk kesuksesan dan efisiensi suatu pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Hague, Harrop & Breslin (1998) dalam Rusfiana dan Cahya (2021:56) menjelaskan birokrasi adalah “organisasi yang terdiri dari aparat bergaji yang melaksanakan keputusan kebijakan”

Birokrasi adalah skema pengorganisasian mendasar dalam melaksanakan norma dan pelayanan. Menurut Rerung et al., (2018), birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Birokrasi menurut Ningsih et al., (2023: 50) birokrasi menunjuk pada empat pengertian, yaitu pertama, menunjuk pada kelompok pranata atau lembaga tertentu. Kedua, menunjuk pada metode khusus untuk mengalokasikan sumber daya dalam suatu organisasi pemerintah untuk

pengambilan keputusan. Ketiga, menunjuk pada kebiroan atau mutu yang membedakan antara biro-biro dengan jenis-jenis organisasi lain. Keempat, sebagai kelompok orang, yakni orang-orang yang digaji yang berfungsi dalam pemerintahan.

2.1.4.2 Lingkungan Birokrasi Pemerintah

Dalam pemerintahan, posisi, peran dan fungsi birokrasi pemerintahan mempunyai sinergitas dengan lingkungan pemerintahan secara ekologis baik secara fisik maupun non fisik. Lingkungan birokrasi pemerintah menurut Ningsih et al., (2023: 50) terdiri dari sub sub struktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran dan kewenangan dalam mencapai visi, misi dan tujuan.

Okniafita dan Dian (2022) menjelaskan lingkungan birokrasi menggambarkan keadaan atau kondisi yang ada didalam organisasi pemerintahan dengan seperangkat aturan dan prosedur yang ditata sebaik mungkin untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Gagola *et al* (2017) menjelaskan lingkungan birokrasi adalah segala hal yang berhubungan dengan aktivitas dan kewenangan pegawai dalam instansi pemerintah baik secara fisik maupun non fisik. Kemudian Furqana dan Dian (2022) menjelaskan lingkungan birokrasi pemerintah adalah lingkungan internal maupun eksternal organisasi pemerintah. Lingkungan internal adalah kondisi yang terjadi dalam organisasi seperti hubungan antar karyawan, sistem pengendalian internal organisasi serta aturan dan prosedur kerja. Kondisi internal organisasi ini dapat dikendalikan serta berubah di masa depan. Sedangkan lingkungan eksternal lebih

berfokus kepada kondisi yang terjadi di luar organisasi yang diantaranya adalah pemerintah yang berada di atasnya, pihak ketiga yang bekerjasama, kebijakan negara, pembaruan teknologi dan masyarakat

2.1.4.3 Indikator Lingkungan Birokrasi

Lingkungan birokrasi menurut Gagola *et al* (2017) diukur dengan 3 (tiga) indikator adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi antar pegawai terjalin dengan baik
2. Jumlah pegawai yang terlibat terkait pengelolaan keuangan dan pengadaan barang jasa mencukupi
3. Pemahaman pegawai pada peraturan

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan Sendy dan Hapzi (2024) dengan judul “Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Halaman III DIPA terhadap Realisasi Anggaran” menggunakan metode Analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini 1) Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran; 2) Pelaksanaan Anggaran berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran; 3) Halaman III DIPA berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran

Penelitian yang dilakukan Ni Kadek, *et al.* (2024) dengan judul Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Regulasi Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah perencanaan anggaran pelaksanaan anggaran,

kompetensi SDM dan regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Penelitian Okniafita dan Dian (2022) dengan judul pengaruh komitmen manajemen, lingkungan birokrasi, dan pengetahuan peraturan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Terdapat pengaruh positif signifikan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Tidak terdapat pengaruh pengetahuan peraturan dan komitmen manajemen terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

Penelitian Furqana dan Dian (2022) dengan judul pengaruh perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran: studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian dapat membuktikan terdapat pengaruh positif dan signifikan perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran. Terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran.

Penelitian Dewi dan Siti (2022) “Analisis Pengendalian Biaya Tenaga Kerja Dengan Menggunakan Anggaran (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara)” Kesenjangan yang terjadi antara anggaran dengan realisasi anggaran biaya tenaga kerja pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara tidak memiliki dampak yang begitu signifikan dan juga tidak memiliki dampak yang negatif karena dalam operasinya tetap menghasilkan SHU.

Penelitian Temalagi dan Korneles (2021) dengan judul pengaruh pengetahuan peraturan dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan

peraturan dan lingkungan birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

Penelitian Engkus, et al., (2020) dengan judul “Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung” menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Hasil penelitian adalah dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, baik secara parsial maupun secara simultan.

Penelitian Yanuriza dan Amir (2019) dengan judul pengaruh perencanaan anggaran, pencatatan administrasi, sumberdaya manusia, komitmen organisasi dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran PNBK Kegiatan Pengamanan Objek Vital pada Satker Jajaran Polda Riau. Hasil penelitian menjelaskan perencanaan anggaran, catatan administrasi, sumber daya manusia, komitmen organisasi mempengaruhi penyerapan anggaran. Sedangkan lingkungan birokrasi tidak mempengaruhi penyerapan anggaran

Penelitian Rerung, et al. (2018), dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah: proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen manajemen, lingkungan birokrasi, dan penerapan *e-procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

Penelitian Nurdiana et al., (2018) dengan judul Penerapan Tahapan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Organisasi. Penerapan tahapan perencanaan anggaran pemerintah daerah yang meliputi penetapan strategi terkait visi dan misi organisasi, tahapan pembuatan tujuan secara berkesinambungan, tahapan penentuan aktivitas secara terencana dan aktivitas secara terencana dan terorganisir, tahapan evaluasi dan pengambilan keputusan secara berkala..

Ringkasan hasil penelitian sebelumnya serta perbedaan dan persamaan dengan penelitian sekarang dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti/Judul	Model	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Halaman III DIPA terhadap Realisasi Anggaran (Sendy, Hapzi, 2024)	Analisis Deskriptif Kualitatif	1) Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran; 2) Pelaksanaan Anggaran berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran; 3) Halaman III DIPA berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran	- Variabel dependent: Penyerapan anggaran - Variabel independent: lingkungan birokrasi - Model analisis	- Lokasi dan objek penelitian - Sampel penelitian. - Variabel pengetahuan peraturan
2	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan	Metode Penelitian Kuantitatif	Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran,	- Variabel dependent: Penyerapan anggaran	- Lokasi dan objek penelitian

	Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Regulasi Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi (Ni Kadek, et al., 2024)		kompetensi SDM dan regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran	- Variabel independent: Perencanaan, SDM, Komitmen organisasi - Model analisis	Sampel penelitian - Variabel komitmen penyerapan anggaran
3	Pengaruh Komitmen Manajemen, Lingkungan Birokrasi, dan Pengetahuan Peraturan terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa (Okniafita dan Dian 2022)	Analisis regresi	Terdapat pengaruh positif signifikan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran. Tidak terdapat pengaruh pengetahuan peraturan dan komitmen manajemen terhadap penyerapan anggaran.	- Variabel dependent: Penyerapan anggaran - Variabel independent: perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi	- Lokasi dan objek penelitian - Sampel penelitian. - Variabel komitmen manajemen dan pengetahuan peraturan
4	Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran: Studi Empiris pada Satuan Kerja erangkat Daerah di Kabupaten Tanah Datar (Furqana dan Dian (2022)	Analisis regresi	Terdapat pengaruh positif dan signifikan perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran. Terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran	- Variabel dependent: Penyerapan anggaran - Variabel independent: perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi - Model analisis	- Lokasi dan objek penelitian - Sampel penelitian.
5	Analisis Pengendalian Biaya Tenaga	Metode Kualitatif	Kesenjangan yang terjadi antara anggaran	- Variabel dependent:	- Lokasi dan objek penelitian

	Kerja Dengan Menggunakan Anggaran (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara)(Dewi Fatmawati & Siti Aliyah, 2022)	Studi Kasus	dengan realisasi anggaran biaya tenaga kerja pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara tidak memiliki dampak yang begitu signifikan dan juga tidak memiliki dampak yang negatif karena dalam operasinya tetap menghasilkan SHU.	penyerapan anggaran - Variabel independent: perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi - Model analisis	- Sampel penelitian.
6	Pengaruh Pengetahuan Peraturan Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa (Temalagi dan Korneles, 2021)	Analisi Regresi Linier	pengetahuan peraturan dan lingkungan birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.	- Variabel dependent: Penyerapan anggaran - Variabel independent: lingkungan birokrasi - Model analisis	- Lokasi dan objek penelitian - Sampel penelitian. - Variabel pengetahuan peraturan
7	Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (Engkus, et al., 2020)	Penelitian Kuantitatif dengan Pendekatan Asosiatif	dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, baik secara parsial	- Variabel dependent: penyerapan anggaran - Variabel independent: perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi - Model analisis	- Lokasi dan objek penelitian - Sampel penelitian. - Variabel komitmen manajemen dan pengetahuan peraturan

			maupun secara simultan		
8	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, Sumberdaya Manusia, Komitmen Organisasi dan Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran PNPB Kegiatan Pengamanan Objek Vital pada Satker Jajaran Polda Riau (Yanuriza, et al., 2019)	Analisis Regresi Linier	Perencanaan anggaran, catatan administrasi, sumber daya manusia, komitmen organisasi mempengaruhi penyerapan anggaran. Sedangkan lingkungan birokrasi tidak mempengaruhi penyerapan anggaran	- Variabel dependent: penyerapan anggaran - Variabel independent: perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi - Model analisis	- Lokasi dan objek penelitian - Sampel penelitian. - Variabel Pencatatan Administrasi, Sumberdaya Manusia, Komitmen Organisasi
9	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Rerung, et al., 2018)	Analisis Regresi Linier	komitmen manajemen, lingkungan birokrasi, dan penerapan <i>e-procurement</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran	- Variabel dependent: Penyerapan anggaran - Variabel independent: lingkungan birokrasi - Model analisis	- Lokasi dan objek penelitian - Sampel penelitian. - Variabel komitmen penyerapan anggaran
10	Penerapan Tahapan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	penerapan tahapan perencanaan anggaran pemerintah daerah yang meliputi	- Variabel dependent: Penyerapan anggaran - Variabel independent:	- Lokasi dan objek penelitian - Sampel penelitian

	Organisasi (Nurdiana, et al., 2018)		penetapan strategi terkait visi dan misi organisasi, tahapan pembuatan tujuan secara berkesinambung an, tahapan penentuan aktivitas secara terencana dan terorganisir, tahapan evaluasi dan pengambilan keputusan secara berkala	perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi - Model analisis	
--	---	--	---	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Perencanaan Anggaran dengan Penyerapan Anggaran

Perencanaan anggaran sangat berpengaruh besar terhadap penyerapan anggaran faktor terbesarnya adalah perencanaan, karena semakin matang aparatur pemetintah sebagai pengelola anggaran dalam merencanakan maka kegiatan/program yang ditargetkan akan berjalan dengan baik pula. (Rifka&Mia, 2019)

2.3.2 Hubungan lingkungan Birokrasi dengan Penyerapan Anggaran

Lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik lingkungan birokrasi tersebut akan menghasilkan ketepatan terhadap waktu dalam penyerapan anggaran terkait pada pengadaan barang dan jasa. (Syaza&Dian, 2022)

2.3.3 Hubungan Perencanaan Anggaran dan Lingkungan Birokrasi dengan Penyerapan Anggaran

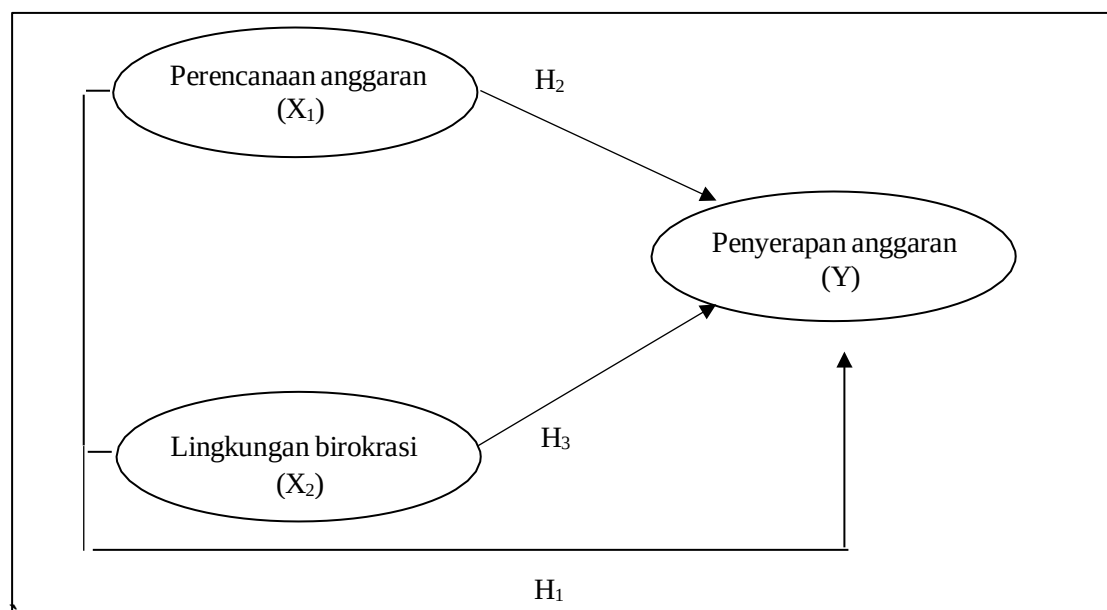
Pemerintah memiliki hak dan kewenangan meminta SKPD untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya termasuk dalam hal ini SKPD harus melaporkan kepada principal mengenai perencanaan atas program dan kegiatan yang telah mereka buat serta melaporkan permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan daya serap anggaran apakah serapan anggaran telah sesuai dengan program atau kegiatan yang telah direncanakan.

Birokrasi merupakan sebuah mekanisme yang dibuat untuk kesuksesan dan efisiensi suatu pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu (Eisenstadt, 1959). Kondisi yang ada pada pemerintah daerah akan sangat mempengaruhi berjalan lancar atau tidak kegiatan mereka. Lingkungan birokrasi yang baik akan membuat pelaksanaan kegiatan operasional menjadi lancar. Namun jika lingkungan birokrasi tidak mendukung kegiatan organisasi maka akan menghambat kinerja organisasi (Eisenstadt, 1959). Oleh karena itu, lingkungan birokrasi akan mempengaruhi penyerapan anggaran. Semakin baik koordinasi dalam implementasinya antara penerima amanah (agen) dan pemberi amanah (prinsipal) akan semakin memudahkan pemegang amanah (agen) dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada di SKPD, sehingga diharapkan serapan anggaran dapat lebih cepat dilakukan. (Syaza&Dian, 2022)

Hubungan dari ketiganya adalah pemerintah merencanakan sejumlah anggaran yang akan di alokasikan kepada program kerja SKPD. Dalam

melaksanakan program kerjanya, SKPD memiliki beberapa aturan dalam system kerjanya atau biasa di sebut lingkungan birokrasi. Aturan-aturan tersebut harus dapat di jalankan sebagai mana mestinya sesuai dengan kebijakan yang berlaku agar program kerja tersebut dapat di jalankan secara efektif dan maksimal. Kemudian setelah berjalannya program kerja tersebut maka untuk melihat sejauh mana ukuran keberhasilan program kerja telah di laksanakan, maka akan diketahui besarnya penyerapan anggaran yang telah dicapai.

Berdasarkan uraian dan pendapat para ahli tersebut di atas, maka Kerangka Konseptual Model Penelitian dapat dilihat pada Gambar berikut



Sumber : Penelitian Furqana dan Dian (2022)

Gambar Kerangka Konseptual Model Penelitian

2.4 Hipotesis

Berdasarkan anggapan dasar sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dugaan perencanaan anggaran berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kota Banda Aceh.
2. Dugaan lingkungan birokrasi berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kota Banda Aceh.
3. Dugaan perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kota Banda Aceh.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Sifat Studi

Sifat studi dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya bersifat menjelaskan hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan dua atau lebih faktor dalam suatu situasi (Sekaran & Bougie, 2017:62). Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah menguji variabel bebas yaitu, konflik peran dan beban kerja terhadap variabel tidak bebas yaitu kinerja pegawai.

3.1.2 Jenis Investigasi

Berdasarkan penyebab yang akan diteliti, maka jenis investigasi ini termasuk penelitian kausal. Penelitian kausal menurut Sugiyono (2017:4) adalah pengujian hubungan sebab akibat, jadi disini ada variabel independen (yang mempengaruhi) yang mempengaruhi variabel dependen (dipengaruhi). Tujuan utama dari riset kausal ini adalah untuk membuktikan hubungan sebab akibat guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas berupa perencanaan, dan lingkungan birokrasi.
2. Variabel terikat berupa penyerapan anggaran.

3.1.3 Tingkat Intervensi Penelitian terhadap Studi

Waktu yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Satu Tahap (*One Shot Study*). Studi ini merupakan penelitian yang datanya

dikumpulkan sekaligus. Data yang dikumpulkan dapat berupa data dari satu atau beberapa subyek penelitian yang mencakup satu atau beberapa periode waktu (hari, minggu, bulan atau tahun). Tipe ini lebih menekankan pada frekuensi tahap pengumpulan data, yaitu satu tahap dan sekaligus (Indriantoro dan Supomo 2018:94).

3.1.4 Situasi Studi

Situasi studi pada penelitian ini tidak diatur. Peneliti ingin mengetahui pengaruh perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi berpengaruh secara simultan terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu studi berjalan tanpa desakan dari data data di lapangan. Pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran di SKPD Kota Banda Aceh.

3.1.5 Unit Analisis

Unit analisis merupakan tingkat agregasi data yang dianalisis dalam penelitian. Unit analisis merupakan elemen yang mempengaruhi proses pemilihan, pengumpulan dan analisis data (Indriantoro dan Supomo, 2018:94). Unit analisis dalam penelitian ini berfokus pada pejabat daerah sebagai pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran di SKPD Kota Banda Aceh.

3.1.6 Horizon Waktu

Waktu yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Satu Tahap (*One Shot Study*). Studi ini merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan sekaligus. Data yang dikumpulkan dapat berupa data dari satu atau beberapa subyek penelitian yang mencakup satu atau beberapa periode waktu (hari,

minggu, bulan atau tahun). Tipe ini lebih menekankan pada frekuensi tahap pengumpulan data, yaitu satu tahap dan sekaligus (Indriantoro dan Supomo 2018:94).

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diteliti (Sugiyono, 2017:55). Sementara sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017:81). Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat pemerintah pada seluruh SKPD di Kota Banda Aceh yang berjumlah sebanyak 30 pejabat atau pada masing-masing SKPD mewakili atau terpilih 2 (dua) sampel yang terdiri dari Kepala Subbagian Keuangan dan Bendaharawan Pengeluaran. Jumlah sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1:

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel Penelitian

No	DINAS	Kepala Subbagian Keuangan	Bendaharawan Pengeluaran	Jumlah Sampel
1	SEKRETARIS			
	Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh	1	1	2
	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	1	1	2
2	DINAS			
	Dinas Perhubungan	1	1	2
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1	2
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1	1	2
	Dinas Pariwisata	1	1	2
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	1	2

	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	1	1	2
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	1	2
	Dinas Tenaga Kerja	1	1	2
	Dinas Syariat Islam	1	1	2
3	BADAN			
	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	1	2
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1	1	2
4	KANTOR			
	Inspektur Inspektorat	1	1	2
	Satuan Polisi Pamong Praja dan WH	1	1	2
	Jumlah	15	15	30

Sumber: Kantor Sekretariat Kota Banda Aceh, 2023

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil pembagian kuesioner. Menurut Indriantoro dan Supomo (2018:146), data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama (tidak melalui media perantara). Pengumpulan data primer dilakukan dengan kuesioner. Kuesioner menurut Indriantoro & Supomo (2018 :154) yaitu penggunaan teknik pengisian jawaban yang disampaikan langsung dari responden. Kuesioner diberikan kepada responden dengan tujuan agar responden dapat memberikan jawaban sesuai dengan tema sentral penelitian. Kuesioner diberikan bobot skala Likert sesuai tingkat kepentingan. Skala Likert menurut Indriantoro dan Supomo (2011 :104) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Susunan Skala Likert

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	1
2	Tidak Setuju	2
3	Kurang setuju	3
4	Setuju	4
5	Sangat Setuju	5

Sumber: Indriantoro dan Supomo, (2018 :104)

3.4 Definisi dan Operasional Variabel

Penelitian ini melibatkan tiga variabel yaitu masing-masing dua variabel bebas antara lain perencanaan anggaran (X_1), dan lingkungan birokrasi (X_2) dan satu variabel terikat yaitu penyerapan anggaran (Y). Karakteristik variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Operasionalisasi dan Indikator Variabel

[illegible]

3.4.1 Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran merupakan proses penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk berbagai kegiatan atau proyek dalam suatu periode waktu tertentu. Penyerapan anggaran juga merupakan salah satu unsur akuntabilitas keuangan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (Ledy, 2017). Indikator penyerapan anggaran digunakan untuk mengukur seberapa efektif dan efisien anggaran tersebut digunakan. Indikator penyerapan anggaran merupakan butir-butir untuk mengukur penyerapan anggaran. Butir-butir indikator ini nantinya akan diterjemahkan ke dalam pernyataan dalam kuesioner penelitian. Sehingga responden dapat menjawab kuesioner tersebut. Realisasi anggaran, menghitung persentase dana yang telah digunakan dibandingkan dengan total anggaran yang dialokasikan.

- 1) Perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran, proses untuk menilai seberapa baik anggaran yang telah direncanakan dan dialokasikan digunakan dalam praktik.
- 2) Konsistensi dalam pelaksanaan program/ kegiatan, merujuk pada keselarasan dan keajegan antara rencana yang telah ditetapkan dengan eksekusi nyata di lapangan. Konsistensi ini penting untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran dari suatu program atau kegiatan dapat tercapai dengan baik, sesuai dengan yang telah direncanakan.
- 3) Ketetapan jadwal penarikan anggaran, merujuk pada rencana dan pelaksanaan yang tepat waktu dalam penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk berbagai program atau kegiatan. Jadwal penarikan

anggaran harus ditetapkan dengan jelas dan dipatuhi untuk memastikan bahwa dana tersedia tepat waktu untuk mendukung berbagai tahap pelaksanaan program atau proyek.

3.4.2 Lingkungan Birokrasi

Lingkungan birokrasi adalah konteks atau kondisi di mana organisasi pemerintahan atau publik beroperasi, termasuk struktur, aturan, prosedur, budaya kerja, serta interaksi antarpegawainya. Lingkungan birokrasi sangat berpengaruh bagi Sumber Daya Manusia (SDM) karena mampu menciptakan budaya kerja tertentu sesuai dengan kebijakan kebijakan yang berlaku pada SKPD tersebut.

Menurut Kvachev (2019) lingkungan birokrasi tidak lagi relative saat ini, karena menurutnya lingkungan birokrasi merupakan suatu disiplin kerja di lingkungan organisasi. Kemudian jaringan birokrasi mampu menciptakan system kerja yang dapat mengontrol dan menstrukturisasi hubungan kekuasaan dalam organisasi yang mengarah pada individualisasi kebebasan.

- 1) Koordinasi antar pegawai terjalin dengan baik, melakukan komunikasi yang baik antar pegawai, pembagian tugas yang tepat, serta kerjasama yang harmonis di antara para pekerja.
- 2) Jumlah pegawai yang terlibat terkait pengelolaan keuangan dan pengadaan barang jasa tercukupi, organisasi memiliki staff yang cukup di barengi dengan keterampilan yang mampu menjalankan tugas-tugas tersebut secara efektif. Hal ini kemudian dapan di pastikan bahwa keuangan berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku.

- 3) Pemahaman pegawai pada peraturan, sejauh mana pegawai ini mengerti, mengetahui, dan mampu menerapkan aturan, kebijakan, prosedur, dan regulasi yang berlaku di lingkungan kerjanya.

3.4.3 Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran merupakan ukuran keuangan dengan indicator penyusunan RKA, penetapan rancangan APBD, dan penetapan APBD. Adapun 6 indikator yang digunakan dalam perencanaan anggaran: Komprehensif, Terperinci, Disiplin, Fleksibel, Prioritas, Keterbukaan.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Pengujian Validitas dan Reliabilitas

3.5.1.1 Pengujian Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kebenaran suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan benar apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara nyata. Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu dengan menggunakan uji *Pearson Product-Moment Coefisient of Corelation* dengan bantuan program SPSS, dengan tingkat signifikansi di bawah 5%. Jika dilakukan secara manual maka nilai korelasi yang diperbolehkan harus dibandingkan dengan nilai kritis korelasi *Product Moment* dimana hasilnya menunjukkan bahwa item pertanyaan mempunyai korelasi di atas 5% atau secara statistik terdapat konsistensi internal (*internal consistency*) yang berarti item-item pertanyaan dapat mengukur aspek yang sama. Ini berarti bahwa setiap data yang ditunjukkan adalah valid.

3.5.1.2 Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Untuk menguji keandalan alat ukur dalam penelitian ini penulis menggunakan uji reliabilitas internal, dengan cara menganalisis data dari satu kali pengketesan saja. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Metode reliabilitas yang digunakan adalah *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS Versi 22. Alat ukur yang bagus harus:

1. Dapat diandalkan
2. Hasil pengukurannya bisa diramalkan
3. Dapat menunjukkan tingkat ketepatan

Cronbach Alpha menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Ukuran reliabilitas dianggap handal berdasarkan *Cronbach Alpa* adalah sebesar 0,60.

3.5.2 Analisis Persepsi Responden

Analisis persepsi responden berguna untuk menganalisis persepsi responden dalam menjawab setiap butir pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Peralatan analisis data untuk menguji persepsi responden dengan menghitung nilai rerata dan kemudian dikelompokkan ke dalam kategori penilaian persepsi respodnen. Rentang skor dihitung dengan membagi selisih antara nilai tertinggi dengan skor terendah dengan jumlah pilihan skor jawaban kuesioner. Secara matetatis ditulis:

$$\text{Rentang skor} = \frac{5 - 1}{5} = 0,8 \dots\dots\dots \text{Suryana (2015)}$$

Selanjutnya, penggolongan persepsi responden akan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4

Persepsi Berdasarkan Likert Skor

Rata-rata Skor	Kategori
1,00 – 1,80	Sanagat tidak baik
1,81 – 2,60	Tidak baik
2,61 – 3,40	Kurang baik
3,41 – 4,20	Baik
4,21 – 5,00	Sangat baik

Untuk memberikan gambaran pencapaian dari setiap variabel penelitian ini, digunakan rentang kriteria rata-rata skor dari jawaban responden. Jika diperoleh rata-rata skor di atas 3,41, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum responden memberikan respon setuju atau baik terhadap setiap item pertanyaan dalam kuesioner.

3.5.3 Regresi Linier Berganda

Peralatan analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Regresi yaitu suatu bentuk peralatan analisis yang dirumuskan dalam bentuk persamaan matematis yang berguna untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (*independent variabel*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Penelitian ini menggunakan rancangan analisis regresi linier berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Penyerapan anggaran
- X₁ = Perencanaan anggaran
- X₂ = Lingkungan birokrasi

$b_1 \& b_2$ = Koefisien regresi
 a = *Constanta*
 e = *Epsilon (Error Term)*

3.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan secara simultan dan secara parsial menggunakan *parameter regresi linier* berganda sebagaimana terlihat pada pembahasan berikut:

1) Hipotesis Pertama

$H_{01}: \beta_1 = 0$; Perencanaan anggaran tidak berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kota Banda Aceh

$H_{a1}: \beta_1 \neq 0$; Perencanaan anggaran berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kota Banda Aceh.

2) Hipotesis Kedua

$H_{02}: \beta_2 = 0$; Lingkungan birokrasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kota Banda Aceh.

$H_{a2}: \beta_2 \neq 0$; Lingkungan birokrasi berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kota Banda Aceh.

3) Hipotesis Ketiga

$H_{03}: \beta_3 = 0$; Perencanaan anggaran secara individu (parsial) tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran

- $H_{a3}: \beta_3 \neq 0$; Perencanaan anggaran secara individu (parsial) berpengaruh terhadap penyerapan anggaran
- $H_{o3}: \beta_1 = \beta_2 = 0$; Perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi tidak berpengaruh secara positif terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kota Banda Aceh.
- $H_{a3}: \beta_1 = \beta_2 \neq 0 (\beta_i \neq 0)$; Perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi berpengaruh secara positif terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kota Banda Aceh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Karakteristik Responden

Karakteristik data responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin, status perkawinan, usia, dan pendidikan terakhir dari responden.

4.1.1.1 Jenis Kelamin

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Responden	Persentase (%)
Pria	20	63,64
Wanita	10	27,27
Total	30	100

Sumber: Data Hasil Olahan SPSS 25, (2024)

Adapun pada aspek jenis kelamin responden menyatakan bahwa jenis kelamin yang paling banyak adalah Pria dengan (20 responden: 63,64 persen), kemudian diikuti wanita dengan (10 responden: 27,27 persen).

4.1.1.2 Status Perkawinan

Pada kriteria responden yang diklasifikasikan menurut status perkawinan pada 30 responden di tampilkan pada Tabel 4.2:

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Status Perkawinan

Status Perkawinan	Responden	Persentase
Kawin	19	57,58
Belum Kawin	10	30,30
Janda/Duda	1	3,03
Total	30	100

Sumber: Data Hasil Olahan SPSS 25, (2024)

Pada aspek status perkawinan responden dengan total responden 30 orang menyatakan bahwa status perkawinan yang paling banyak adalah pada “Kawin” dengan (19 responden: 57,58 persen), kemudian pada status “Belum Kawin” dengan (10 responden: 30,30 persen), pada kondisi paling kecil yaitu status “Janda/Duda” dengan (1 responden: 3,03 persen).

4.1.1.3 Usia Responden

Pada kriteria responden yang diklasifikasikan menurut usia pada 30 responden di tampilkan pada Tabel 4.4:

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Usia

Usia	Responden	Persentase (%)
<20 Tahun	0	0
>20-29 Tahun	7	21,21
>29-39 Tahun	11	33,33
>39-49 Tahun	10	30,30
>49 Tahun	2	5,06
Total	30	100

Sumber: Data Hasil Olahan SPSS 25, (2024)

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 4.4 menyatakan bahwa responden pada aspek usia responden menyatakan bahwa rentang usia yang paling banyak adalah pada usia >29-39 tahun (11 responden: 33,33 persen) kemudian pada usia >39-49 tahun (10 responden: 30,30 persen), pada usia >20-29 tahun dengan (7 responden: 21,21), dan pada usia >49 tahun (2 responden: 5,06 persen).

4.1.1.4 Pendidikan Terakhir

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Responden	Presentase
SMA	0	0
Diploma/Akademi	0	0
Sarjana	12	36,36

Pendidikan	Responden	Presentase
Magister	17	51,52
Doktor	1	3,03
Total	30	100

Sumber: Data Hasil Olahan SPSS 25, (2024)

Pada kondisi responden dengan total responden 30 orang menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang paling banyak adalah pada tamatan Magister dengan (17 responden: 51,52 persen), kemudian pada kondisi lulusan sarjana dengan (12 responden: 36,36 persen), pada kondisi selanjutnya yaitu lulusan Doktor (1 responden: 3,03 persen), sedangkan pada tingkat pendidikan SMA, dan Diploma/Akademi masing masing memiliki 0 responden.

4.1.2 Persepsi Responden Terhadap Variabel

4.1.2.1 Persepsi Responden Terhadap Perencanaan Anggaran (X₁)

Persepsi responden terhadap konsumsi diberikan alternatif pilihan berupa sangat setuju (skor 1) sampai dengan sangat tidak setuju (skor 5). Perbedaan persepsi responden berupa tinggi atau rendahnya atas jawaban kuesioner yang berkaitan dengan perencanaan anggaran dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut ini:

Tabel 4.5 Persepsi Responden Variabel Perencanaan Anggaran

Variabel Perencanaan anggaran	Keterangan					Rata- rata
	Sangat Setuju (SS)	Setuju (S)	Kurang Setuju (KS)	Tidak Setuju (TS)	Sangat Tidak Setuju (STS)	
Perencanaan anggaran telah dilaksanakan secara menyeluruh untuk semua kegiatan.	15	15	-	-	-	4.50

Perencanaan anggaran telah dilaksanakan secara terperinci untuk berbagai kegiatan baik kegiatan utama maupun pendukung.	16	14	-	-	-	4.43
Perencanaan anggaran telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.	12	18	-	-	-	4.53
Perencanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan perubahan-perubahan yang akan dan telah terjadi di lingkungan sosial masyarakat.	13	17	-	-	-	4.53
Perencanaan anggaran telah dilaksanakan dengan mengutamakan kegiatan yang lebih dibutuhkan dan memberi dampak dan manfaat besar.	10	20	-	-	-	4.63
Perencanaan anggaran melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, dengan membuka ruang diskusi dan konsultasi publik untuk memastikan anggaran yang disusun mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.	14	16	-	-	-	4.47
Rata-rata						4,52

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 25, (2024)

Pada Tabel 4.16 menunjukkan bahwa keseluruhan nilai rata-rata (mean) variabel penyerapan anggaran adalah sebesar 4,52 hal ini dapat disimpulkan bahwa

tanggapan responden terhadap penyerapan anggaran dapat digolongkan sangat baik, karena nilai rata-rata (mean) berada pada 4,52 (sangat baik).

4.1.2.2 Persepsi Responden Terhadap Lingkungan Birokrasi (X₂)

Tabel 4.6 Persepsi Responden Variabel Lingkungan Birokrasi

Variabel Lingkungan Birokrasi	Keterangan					Rata-rata
	Sangat Setuju (SS)	Setuju (S)	Kurang Setuju (KS)	Tidak Setuju (TS)	Sangat Tidak Setuju (STS)	
Pejabat daerah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, pengajuan SPM hingga pengeluaran SP2D oleh DPPKA terkoordinasi dengan baik	16	14	-	-	-	4.47
Pejabat daerah dan ASN yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa jumlah dan kemampuannya sesuai dengan kebutuhan	16	14	-	-	-	4.50
Pejabat daerah dan bendaharawan yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah dapat dan telah memahami semua peraturan yang berlaku	10	20	-	-	-	4.63
Total						4,53

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 25, (2024)

Tabel 4.17 menunjukkan bahwa keseluruhan nilai rata-rata (mean) variabel lingkungan birokrasi adalah sebesar 4.53 hal ini dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap lingkungan birokrasi dapat digolongkan sangat baik, karena nilai rata-rata (mean) berada pada rentang 4.53 (Sangat Baik).

4.1.2.3 Persepsi Responden Terhadap Penyerapan Anggaran (Y)

Tabel 4.7 Persepsi Responden Variabel Penyerapan Anggaran

Variabel Penyerapan Anggaran	Keterangan					Rata-rata
	Sangat Setuju (SS)	Setuju (S)	Kurang Setuju (KS)	Tidak Setuju (TS)	Sangat Tidak Setuju (STS)	
Realisasi anggaran setiap tahun telah dilaksanakan secara efektif atau rata-rata di atas 80% dari rencana anggaran.	15	15	-	-	-	4.50
Rencana dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan Renja 5 (lima) tahun, tidak menyimpang dari indikator kinerja yang ingin dicapai (Renstra).	13	17	-	-	-	4.57
Pencairan anggaran untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam lingkungan birokrasi.	10	20	-	-	-	4.63
Rata-rata						4,57

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, (2024)

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa keseluruhan nilai rata-rata (mean) variabel penyerapan anggaran adalah sebesar 4,57 hal ini dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap penyerapan anggaran dapat digolongkan sangat baik, karena nilai rata-rata (mean) berada pada rentang 4,57 (kategori Sangat baik).

4.1.2.4 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan gambaran variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu perencanaan anggaran (X_1), lingkungan birokrasi (X_2) dan

penyerapan anggaran (Y). Berdasarkan hasil kuisioner yang menunjukkan hasil analisis deskriptif dari masing-masing variabel sebagai berikut:

Tabel 4.8 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perencanaan Anggaran	30	24	30	27.24	2.000
Lingkungan Birokrasi	30	12	15	13.58	1.200
Penyerapan Anggaran	30	12	15	13.76	1.347
Valid N (listwise)	30				

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 25 (2024)

Tabel 4.5 hasil SPSS di atas memperlihatkan deskripsi variabel dalam penelitian ini secara statistic. Minimum adalah nilai terendah dari total nilai pertanyaan setiap variabel, sedangkan Maksimum adalah nilai tertinggi nilai pertanyaan setiap variabel.

4. Perencanaan Anggaran (X_1)

Perencanaan anggaran memiliki nilai minimum sebesar 24, untuk nilai maksimum sebesar 30, rata-rata nilai dari total pertanyaan adalah 27,24 dengan standar deviasi 2.000.

5. Lingkungan Birokrasi (X_2)

Lingkungan birokrasi memiliki nilai minimum sebesar 12, untuk nilai maksimum sebesar 15, rata-rata nilai dari total pertanyaan adalah 13,58 dengan standar deviasi 1.200.

6. Penyerapan Anggaran (Y)

Penyerapan anggaran memiliki nilai minimum sebesar 12, untuk nilai maksimum sebesar 15, rata-rata nilai dari total pertanyaan adalah 13,76 dengan standar deviasi 1.347

4.1.3 Hasil Pengujian Instrumen

Pengujian kualitas data yang telah diperoleh ataupun dikumpulkan dari pengisian kuesioner dapat diuji dan dievaluasi melalui uji validitas dan uji reliabilitas yang dinyatakan dengan hasil koefisien korelasi dari *Cronbach Alpha*, instrumen harus memenuhi persyaratan utama yaitu valid dan reliabel.

4.1.3.1 Pengujian Validitas

Uji validitas data yang digunakan pada penelitian ini adalah secara statistik, yaitu menggunakan pengujian *Pearson product-moment coefficient of correlation* dengan pengaplikasian program SPSS 26. Hasil analisis data menampilkan bahwa seluruh pernyataan/pertanyaan memiliki level, jika nilai korelasi yang didapatkan diatas nilai kritis 5% (>0.1986), maka disimpulkan bahwa item pertanyaan atau pernyataan memiliki signifikansi dan validitas konstruk (*internal consistence*). Perolehan data yang valid dengan pengujian ini dapat dilanjutkan untuk melakukan analisis-analisis selanjutnya. Hasil pengujian validitas data ditampilkan pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas

No. Pernyataan	Variabel	Koefisien Korelasi	Nilai Kritis 5% (N=30)	Ket
X1.1	Perencanaan Anggaran	0,735	0,3061	Valid
X1.2		0,814		
X1.3		0,635		
X1.4		0,697		
X1.5		0,541		
X1.6		0,558		
X2.1	Lingkungan Birokrasi	0,810	0,3061	Valid
X2.2		0,759		
X2.3		0,780		
Y.1	Penyerapan Anggaran	0,965	0,3061	Valid
Y.2		0,906		
Y.3		0,840		

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 25 (2024)

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid, hal ini didasari dengan perolehan nilai kritis korelasi *product moment* berada di bawah nilai koefisien korelasi dari setiap variabelnya. Sehingga semua pertanyaan per pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner dapat dinyatakan valid dan bisa digunakan untuk analisis selanjutnya yang lebih rinci karena telah memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian-pengujian selanjutnya.

4.1.3.2 Pengujian Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui kehandalan dari instrumen penelitian yang digunakan. Pengujian reliabilitas hanya dilakukan sekali pada setiap kelompok responden pada setiap variabelnya. Kehandalan suatu instrumen penelitian dapat dilihat dari hasil koefisien *Cronbach Alpha* ($> 0,60$). Jika derajat kehandalan data lebih besar dari koefisien *Cronbach Alpha*, maka hasil

suatu pengukuran dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebagai alat ukur tingkat konsistensi dan ketelitian pemikiran yang baik. Hasil pengujian validitas data ditunjukkan pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.10 Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	Item Variabel	Nilai Alpha	Nilai Kritis	Ket
Perencanaan Anggaran	6	0.746	0,60	Handal
Lingkungan Birokrasi	3	0.780	0,60	Handal
Penyerapan Anggaran	3	0.889	0,60	Handal

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 25, (2024)

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai alpha yang diperoleh pada setiap variabel lebih $> 0,60$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan per pertanyaan yang digunakan dalam variabel penelitian dinyatakan handal dan sudah memenuhi kredibilitas.

4.1.3.3 Analisis Skala Likert

Jumlah responden yang telah mengisi kuesioner dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 responden, dari keseluruhan responden tersebut akan dianalisis untuk melihat jumlah frekuensi atas tanggapan atau jawaban yang telah diberikan. Keseluruhan pernyataan atau pertanyaan kuesioner berjumlah 12 item, dari 12 item kuesioner akan dicari rata-rata (mean) terhadap masing-masing variabel penelitian dan diinterpretasikan berdasarkan panjang kelas. Hasil interpretasi nilai rata-rata (mean) tanggapan/jawaban responden ditunjukkan pada Tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.11 Interpretasi Nilai Rata-Rata Tanggapan Responden

Nilai	Keterangan
1.00-1.80	Sangat tidak baik
1.81-2.60	Tidak baik
2.61-3.40	Cukup baik
3.41-4.20	Baik
4.21-5.00	Sangat baik

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, (2024)

4.1.3.4 Hasil Analisis Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji regresi berganda ditampilkan dalam tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12 Hasil Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-1.587	1.898		-.836	.410
	Perencanaan Anggaran	.296	.090	.440	3.303	.002
	Lingkungan Birokrasi	.536	.150	.477	3.582	.001

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Sumber: Data Hasil Olahan SPSS 25, (2024)

Dari tabel diatas diketahui persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -1,587 + 0,296X_1 + 0.536X_2 + e$$

Dari persamaan tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar -1,587 menunjukkan bahwa jika seluruh variabel bebas seperti Perencanaa Anggaran (X1), dan variabel Lingkungan Birokrasi (X2), tetap atau tidak mengalami peningkatan maka penyerapan anggaran (Y) sebesar -1,587.

2. Koefisien regresi variabel Perencanaan anggaran (X1) sebesar 0.296 yang menunjukkan bahwa apabila Perencanaan anggaran (X1) meningkat satu satuan maka akan dapat meningkatkan Penyerapan Anggaran (Y) sebesar 0.296.
3. Koefisien regresi variabel Lingkungan Birokrasi (X2) sebesar 0.536 yang menunjukkan bahwa apabila Lingkungan Birokrasi (X2) meningkat satu satuan maka Penyerapan Anggaran (Y) akan meningkat sebesar 0.536.

4.1.3.5 Uji Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis merupakan jawaban untuk semua rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut terdiri dari rumusan masalah pertama, kedua, dan ketiga. Ketiga hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini secara berurutan akan dipaparkan pada bagian ini. Hasil pengujian hipotesis secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.13

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Hipotesis

Persamaan $Y = -1,586 + 0,296 \text{ PerA} + 0,536 \text{ LB} + \varepsilon$	
t-value	-0,836 3,303 3,582
Sig. value	0,410 0,002 0,001
F-Value / Sig.	34,476 / 0,000
R / R2 / Adj.R2	0,835 / 0,679 / 0,677

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2025

Berdasarkan Tabel 4.13 terlihat hasil pengujian hipotesis yang merupakan jawaban untuk rumusan masalah dalam penelitian ini. Secara berurutan jawaban rumusan masalah tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

4.1.3.6 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini merupakan jawaban atas rumusan masalah pertama. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah

variabel PerA (Perencanaan Anggaran) dan LB (Lingkungan Birokrasi) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y (Penyerapan anggaran).

Berdasarkan hasil pengolahan data yang ditampilkan pada Tabel 4.13, nilai koefisien regresi PerA dan LB masing-masing sebesar 0,296 dan 0,536. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada variabel PerA akan meningkatkan nilai Y sebesar 0,296, dan setiap peningkatan satu unit pada variabel LB akan meningkatkan nilai Y sebesar 0,536. Koefisien konstanta sebesar -1,586 menunjukkan nilai dasar dari Y saat semua variabel independen bernilai nol.

Selanjutnya, berdasarkan nilai t-hitung, variabel PerA memiliki t-value sebesar 3,303 ($p = 0,002$), sedangkan variabel LB memiliki t-value sebesar 3,582 ($p = 0,001$). Kedua nilai ini memiliki tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa PerA dan LB berpengaruh signifikan terhadap Y.

4.1.3.7 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Hasil pengujian hipotesis kedua merupakan jawaban untuk rumusan masalah yang kedua. Hasil pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini akan menjawab apakah pembelian dari pihak berelasi berpengaruh positif terhadap laba usaha perusahaan.

Berdasarkan Tabel 4.13 terlihat nilai koefisien beta (β) pembelian dari perencanaan anggaran sebesar 0,296. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,296 \neq 0$. Hal ini berarti nilai koefisien beta pembelian dari pihak berelasi tidak sama dengan nol ($\beta_1 \neq 0$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a2} diterima, artinya perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

4.1.3.8 Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Hasil pengujian hipotesis ketiga merupakan jawaban untuk rumusan masalah yang ketiga. Hasil pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini akan menjawab apakah lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan Tabel 4.13 terlihat nilai koefisien beta (β) penjualan kepada pihak berelasi sebesar 0,536. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,536 \neq 0$. Hal ini berarti nilai koefisien beta tidak sama dengan nol ($\beta \neq 0$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a3} diterima, artinya lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa, Perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Nilai koefisien beta (β_1) pembelian dari pihak berelasi sebesar 0,296. Nilai ini tidak sama dengan nol ($0,296 \neq 0$). Dengan demikian maka H_{a1} diterima. Artinya bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa perencanaan anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banda Aceh. Penelitian ini sejalan dengan temuan Furqana dan Handayani (2022), yang mengungkapkan bahwa perencanaan anggaran yang matang dapat memengaruhi tingkat penyerapan anggaran secara positif. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran sangat penting dalam menentukan keberhasilan realisasi anggaran. Perencanaan anggaran yang

baik memberikan kerangka kerja yang jelas dan terarah bagi pelaksanaan program kerja, yang pada akhirnya berkontribusi pada efektivitas penggunaan dana publik.

Sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah, perencanaan anggaran berfungsi sebagai panduan bagi SKPD dalam menentukan alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan. Berdasarkan teori *Goal Setting*, penetapan tujuan yang spesifik, terukur, dan realistis dapat mendorong organisasi mencapai target dengan lebih efektif. Dalam konteks ini, perencanaan anggaran yang komprehensif, terperinci, dan berbasis pada prioritas menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa setiap program kerja dapat berjalan dengan baik. Perencanaan yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait juga memungkinkan adanya keterbukaan, sehingga menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap penggunaan anggaran.

Ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran dapat menyebabkan berbagai hambatan, seperti revisi dokumen anggaran yang memengaruhi jadwal pelaksanaan program. Keterlambatan ini tidak hanya mengganggu pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dapat menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan anggaran pada akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus terhadap setiap aspek perencanaan agar target serapan anggaran dapat dicapai secara optimal.

4.2.2 Pengaruh Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa, Lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Nilai koefisien beta (β_2) lingkungan birokrasi sebesar 0,536. Nilai ini tidak sama dengan nol

(0,536≠0). Dengan demikian maka Ha2 diterima. Artinya bahwa lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Bedasarkan hasil penelitian juga didapatkan bahwa Lingkungan birokrasi yang kondusif juga terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran di SKPD Kota Banda Aceh. Hasil ini mendukung penelitian Temalagi dan Korneles (2021), yang menyebutkan bahwa faktor seperti koordinasi antarpegawai, jumlah tenaga kerja yang memadai, serta pemahaman pegawai terhadap regulasi menjadi elemen penting dalam meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran. Lingkungan birokrasi yang terstruktur dengan baik mampu meminimalkan hambatan teknis dan administratif, sehingga mempercepat proses pencairan dan pelaksanaan anggaran.

Lingkungan birokrasi yang ideal ditandai dengan adanya komunikasi yang efektif antarpegawai, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, serta penerapan aturan kerja yang jelas. Koordinasi yang baik antarpegawai memastikan setiap tugas dapat dikerjakan sesuai jadwal, sementara jumlah tenaga kerja yang mencukupi memungkinkan beban kerja dapat didistribusikan secara merata. Selain itu, pemahaman pegawai terhadap regulasi menjadi kunci dalam mengurangi kesalahan administrasi yang dapat menghambat proses penyerapan anggaran.

Namun, lingkungan birokrasi yang tidak efisien sering kali menjadi penyebab utama lambatnya realisasi anggaran. Kebiasaan menunda pekerjaan, kurangnya koordinasi, atau kendala teknis lainnya dapat mengakibatkan program kerja tertunda, yang pada akhirnya memengaruhi capaian penyerapan anggaran. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan, penyederhanaan

proses administrasi, dan penguatan koordinasi antarunit menjadi langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan anggaran.

4.2.3 Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Lingkungan Birokrasi secara Bersama Terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel Perencanaan Anggaran (PerA) dan Lingkungan Birokrasi (LB) tidak sama dengan nol ($\beta_1 \neq 0$ dan $\beta_2 \neq 0$). Hal ini berarti hipotesis pertama (Ha3) diterima. Dengan demikian, Perencanaan Anggaran dan Lingkungan Birokrasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran.

Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat Penyerapan Anggaran pada suatu instansi atau organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas Perencanaan Anggaran dan kondisi Lingkungan Birokrasi. Berdasarkan nilai F-Sig sebesar 0,000, pengaruh kedua variabel ini secara simultan signifikan terhadap variabel dependen. Ini mengindikasikan bahwa semakin baik perencanaan anggaran dan semakin kondusif lingkungan birokrasi, semakin optimal penyerapan anggaran yang terjadi.

Pengaruh ini mencerminkan bahwa perencanaan anggaran yang efektif, mulai dari pengidentifikasian kebutuhan, penyusunan prioritas, hingga pengalokasian sumber daya, menjadi kunci utama dalam memaksimalkan penyerapan anggaran. Di sisi lain, lingkungan birokrasi yang mendukung, seperti prosedur yang transparan, koordinasi yang baik, dan pengurangan hambatan administratif, dapat memperlancar pelaksanaan anggaran.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kontribusi kedua variabel independen terhadap penyerapan anggaran tercermin dari nilai Adjusted R^2 sebesar

0,677. Artinya, sekitar 67,7% variasi dalam penyerapan anggaran dapat dijelaskan oleh variabel Perencanaan Anggaran dan Lingkungan Birokrasi, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Fluktuasi dalam tingkat penyerapan anggaran, baik berupa peningkatan maupun penurunan, mencerminkan dinamika perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi. Dengan kata lain, kedua variabel ini saling mendukung untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat terserap dengan baik sesuai tujuan yang telah direncanakan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Furqana dan Handayani (2022), yang menyatakan bahwa kualitas perencanaan anggaran dan efisiensi birokrasi memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas penyerapan anggaran. Hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa peningkatan kualitas Perencanaan Anggaran dan pembenahan Lingkungan Birokrasi dapat mendorong optimalisasi dalam penggunaan anggaran, yang pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi atau pemerintahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kota Banda Aceh, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan anggaran (X_1) memiliki nilai koefisien 0,296 dan tingkat signifikansi $0,002 < 0,05$ yang artinya perencanaan anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran (Y).
2. Lingkungan birokrasi memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,536 dan tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$ artinya lingkungan birokrasi (X_2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran (Y).
3. Secara simultan, perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, berikut beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi untuk pemerintah daerah, khususnya SKPD di Kota Banda Aceh:

1. Pemerintah daerah perlu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pegawai SKPD dalam menyusun anggaran yang lebih komprehensif, prioritas, dan berbasis data yang akurat.

2. SKPD perlu meningkatkan koordinasi antarpegawai melalui rapat berkala, pembagian tugas yang jelas, dan komunikasi yang lebih efektif.
3. Dalam mendukung efisiensi dan akurasi pengelolaan anggaran, pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi seperti sistem manajemen keuangan berbasis elektronik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alfayuni, Firda dan Neneng Dahtiah (2021) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran dan Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Cirebon). *Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung, Vol 4 No 5 Hal 1121-1127*. Politeknik Negeri Bandung, Bandung
- Ani, Lely., JMV Mulyadi., Dwi Pratowo (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Dengan Perencanaan Anggaran Sebagai Pemoderasi Pada Pemerintah Kota Depok Tahun 2013-2017. *Ekobisman Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen Vol 5 No 1 Universitas Pancasila*.
- Arif Soyan Mirrian et.al (2019) *Manajemen Pemerintah*, Jakarta: Universitas Terbuka. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2011). *Menyoal Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta: Paris Review
- Dewi Fatmawati dan Siti Aliyah (2022) Analisis Pengendalian Biaya Tenaga Kerja Dengan Menggunakan Anggaran (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara) *Ekobis Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah, Vol. 6, No. 2*
- Elim, Meyulinda Aviana., Deasy Susana Ndaparoka, Thobias Elianus David Tomasowa (2018) Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Kupang *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Audit Vol. 3 No. 2*,
- Engkus, Endang Hermawan dan Endah Dwi Rahmawati (2020) Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. *JURNAL PAPATUNG: Vol. 3 No. 2 Tahun 2020*
- Fajar, Nurul dan Muhammad Arfan (2017). Analisis Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol. 10 No. 2*, Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Fauzan (2020) *Budgetary Slack pada Anggaran Sektor Publik*. Bogor: Guepedia
- Furqana, S., & Dian, F. H. (2022). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran: Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 10(3), 215-230.
- Gagola, Ledy S., Jullie J. Sondakh dan Jessy D.L. Warongan (2017) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud

Jurnal Ilmiah Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Sam Ratulangi

Hadiutomo, Kusno (2021) *Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Dan Terdesentralisasi*. Yogyakarta: Deepublish

Hantono, Lakharis Inuzula, Sri Apriyanti Husain (2021) *Akuntansi Sektor Publik*. Jawa Barat Media Sain Indoensia.

Harahap, Sasmita Atika Sari., Taufeni Taufik dan Nurazlina (2020) Pengaruh Perencanaan Anggaran, Lingkungan birokrasi, Pencatatan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada OPD Kota Dumai). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 13, No. 1* Universitas Riau, Program Studi Akuntansi.

Hartoto., Tatmimah, Itat., Endraria (2023) *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis. Untuk Akuntansi Dan Manajemen*”, Yogyakarta: BPFE

Khusaini, Mohamad (2019) *Ekonomi Publik*. Malang: UB Press

Mardiasmo, (2018)., *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.

Ni Kadek Wirastuti, Gede Adi Yuniarta, Edy Sujana (2024) Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Regulasi Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha Vol.15 No. 01*

Nurdiana Mulyatini, Elin Herlina dan Deni Mardiana (2018) Penerapan Tahapan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Efektifitas Organisasi. *Ekonomologi Jurnal Ilmu Manajemen Vol. 5, No.2*

Nurkholis, dan Moh. Khusaini · (2019) *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: TIM UB Press.

Okniafita, Nindy dan Dian Fitria Handayani (2022) Pengaruh Komitmen Manajemen, Lingkungan Birokrasi, dan Pengetahuan Peraturan terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) Vol. 4, No 3 Hal 482-495*

Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*

- Rahayu, Sulis Puji (2020) Pengaruh Perencanaan Anggaran Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Tahun 2019 (Studi Kasus: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi UMBY* Vol 2 No 1 hal 1-10.
- Ramadhani, Rifka dan Mia Angelina Setiawan (2019) Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia Dan Pengadaan Barang/ Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* Vol. 1, No. 2 Hal 710-726. Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Ramdhani, Dadan dan Indi Zaenur Anisa (2017) Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Lingkungan birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu* Vol.10 No.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Ramopolii, Jingsi Virginia., Paulina Van Rate dan Joubert B. Maramis (2022) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Badan Kepegawaian Dan Diklat Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara *Jurnal EMBA* Vol.10, No.1 , Hal. 1409-1420
- Ratag, Wieske Anneleen., Anderson G. Kumenaung., dan Daisy S.M. Engka (2019) Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Lingkungan Iniversitas Sam Ratulangi. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* Vol.20 No.3 Hal 78-92
- Ratag, Y., et al. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keuangan*, 8(2), 167-180.
- Rerung, et al. (2018), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, Vol 3 No 1 Hal 192-201
- Rindawati, Septi (2021) *Responsibilitas Pengelolaan APBD*. Bandung Media sain Indoensia
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management* (13th ed.). New Jersey: Pearson Education.
- Rusfiana, Yudi dan Cahya Suprianta (2021) *Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangannya*. Bandung: ALFABETA
- Rusfiana, Yudi dan Cahya Suprianta (2021) *Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangannya*. Bandung: Alfabeta

- Santoso, Singgih. (2012). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media. Komputindo
- Sawitri, Riska Agi (2022) Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian/ Lembaga (K/L) Dan Pemerintah Daerah *Jurnal Akuntansi Aisyah* Vol 2 No 1 Hal: 54-65
- Sendy Cokro Wibowo dan Hapzi Ali (2024) Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Halaman III DIPA terhadap Realisasi Anggaran. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* Vol. 5, No. 4, Juni–Juli 2024
- Sinaga, Edward James, (2018). Analisis Lemahnya Penyerapan Anggaran Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, *Jurnal Rechtvinding* Vol 5 No 2 Pusat Pengkajian dan Pengembangan, Kemnetrian Hukum mdan HAM.
- Sugiyono. (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Refika.
- Sujatmika (2020) *Menuju Penganggaran Daerah Berdasarkan Pancasila*. Malang Peneleh.
- Syaza, F., & Dian, R. (2022). Hubungan Lingkungan Birokrasi dengan Penyerapan Anggaran pada SKPD Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 123-138.
- Temalagi, H., & Korneles, T. (2021). Pengaruh Pengetahuan Peraturan dan Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 12(4), 345-360.
- Temalagi, Selva dan Korneles Sairatu (2021) P Pengetahuan Peraturan Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa *Accounting Research Unit: ARU Journal* Volume 2 Nomor 2
- Tisnawati, Ernie Sule dan Saefullah Kurniawan (2018) *Pengantar Manajemen*. Granada Media, Jakarta.
- Urbinas, Elisabeth (2020) Pengaruh Faktor Kepemimpinan, Kompetensi Dan Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jayapura. *Jurnal Ilmiah Akuntansi* Vol 2 No 3 Hal 1-12.
- Yamin, Muhammad (2022) *Monograf Relasi Kuasa Eksekutif - Legislatif dalam Pembahasan APBD*. Pekalongan: Nasya Expanding Managemen.

- Yanuriza, Amir Hasan, M. Rasuli (2019) Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, Sumberdaya Manusia, Komitmen Organisasi dan Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran PNBK Kegiatan Pengamanan Objek Vital pada Satker Jajaran Polda Riau *JE-Vol.27-No.4* -pp.409-423.
- Yuliani, Irma (2019) *Pengaruh Belanja Dan Investasi Terhadap Kemandirian Dan Pertumbuhan Ekonomi*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indoensia

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. KEUSIONER PENELITIAN

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN LINGKUNGAN

BIROKRASI TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN: STUDI EMPIRIS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI KOTA BANDA

ACEH

No Responden	:	
Petunjuk Pengisian	:	Beri tanda <i>checklist</i> (✓) pada salah satu jawaban yang dipilih sesuai keadaan yang sebenarnya dan jawablah pertanyaan dengan jujur. Keterangan: SS: Sangat Setuju; S: Setuju; KS: Kurang Setuju; TS: Tidak Setuju; STS: Sangat Tidak Setuju.
Karakteristik Responden		
1) Jenis Kelamin	1) Laki-laki	☐
	2) Perempuan	☐
2) Status Perkawinan	1) Kawin	☐
	2) Belum Kawin	☐
	3) Janda / Duda	☐
3) Usia Responden	1) < 20 Tahun	☐
	2) ≥ 20 – 29 Tahun	☐
	3) > 29 – 39 Tahun	☐
	4) > 39 – 49 Tahun	☐
	5) > 49 Tahun	☐
4) Pendidikan Terakhir	1) ≤ SMA	☐
	2) Diploma / Akademi	☐
	3) Sarjana	☐
	4) Magister	☐
	5) Doktor	☐

A. KUESIONER PERENCANAAN ANGGARAN

No	Pernyataan	Tingkat Kesesuaian				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Perencanaan anggaran telah dilaksanakan secara menyeluruh untuk semua kegiatan.					
2.	Perencanaan anggaran telah dilaksanakan secara terperinci untuk berbagai kegiatan baik kegiatan utama maupun pendukung.					
3.	Perencanaan anggaran telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.					
4.	Perencanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan perubahan-perubahan yang akan dan telah terjadi di lingkungan sosial masyarakat.					
5.	Perencanaan anggaran telah dilaksanakan dengan mengutamakan kegiatan yang lebih dibutuhkan dan memberi dampak dan manfaat besar.					
6.	Perencanaan anggaran melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, dengan membuka ruang diskusi dan konsultasi publik untuk memastikan anggaran yang disusun mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.					

A. KUESIONER LINGKUNGAN BIROKRASI

No	Pernyataan	Tingkat Kesesuaian				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Pejabat daerah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, pengajuan SPM hingga pengeluaran SP2D oleh DPPKA terkoordinasi dengan baik					
2.	Pejabat daerah dan ASN yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa jumlah dan kemampuannya sesuai dengan					

	kebutuhan					
3.	Pejabat daerah dan bendaharawan yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah dapat dan telah memahami semua peraturan yang berlaku					

C. KUESIONER PENYERAPAN ANGGARAN

No	Pernyataan	Tingkat Kesesuaian				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Realisasi anggaran setiap tahun telah dilaksanakan secara efektif atau rata-rata di atas 80% dari rencana anggaran.					
2.	Rencana dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan Renja 5 (lima) tahun, tidak menyimpang dari indikator kinerja yang ingin dicapai (Renstra).					
3.	Pencairan anggaran untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam lingkungan birokrasi.					

LAMPIRAN

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perencanaan Anggaran	30	24	30	27.24	2.000
Lingkungan Birokrasi	30	12	15	13.58	1.200
Penyerapan Anggaran	30	12	15	13.76	1.347
Valid N (listwise)	30				

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.835 ^a	.697	.677	.766

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Birokrasi, Perencanaan Anggaran

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	40.458	2	20.229	34.476	.000 ^b
	Residual	17.603	30	.587		
	Total	58.061	32			

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

b. Predictors: (Constant), Lingkungan Birokrasi, Perencanaan Anggaran

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-1.587	1.898		-.836	.410
	Perencanaan Anggaran	.296	.090	.440	3.303	.002
	Lingkungan Birokrasi	.536	.150	.477	3.582	.001

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardi-
zed
Residual

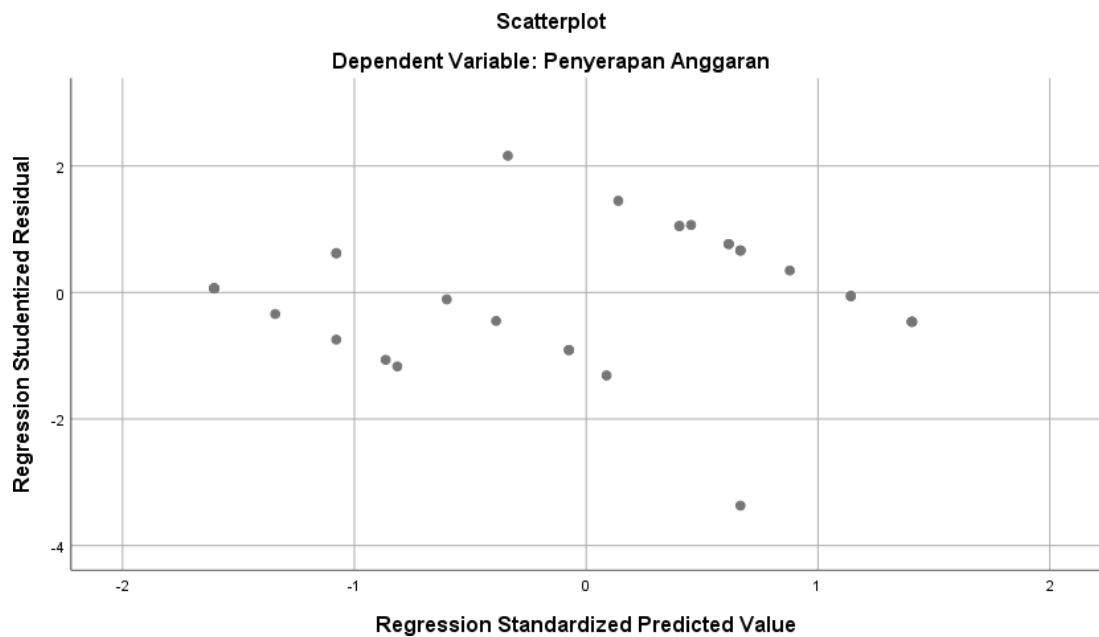
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.74167398
Most Extreme Differences	Absolute	.112
	Positive	.083
	Negative	-.112
Test Statistic		.112
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.



Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.587	1.898		-.836	.410		
Perencanaan Anggaran	.296	.090	.440	3.303	.002	.569	1.756
Lingkungan Birokrasi	.536	.150	.477	3.582	.001	.569	1.756

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

		Correlations						Perencana an Anggaran
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
X1.1	Pearson Correlation	1	.764**	.271	.517**	.275	.092	.735**
	Sig. (2-tailed)		.000	.127	.002	.121	.611	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.2	Pearson Correlation	.764**	1	.537**	.414*	.184	.332	.814**
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.017	.305	.059	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.3	Pearson Correlation	.271	.537**	1	.256	-.012	.465**	.635**
	Sig. (2-tailed)	.127	.001		.151	.949	.006	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.4	Pearson Correlation	.517**	.414*	.256	1	.498**	.097	.697**
	Sig. (2-tailed)	.002	.017	.151		.003	.593	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.5	Pearson Correlation	.275	.184	-.012	.498**	1	.229	.541**
	Sig. (2-tailed)							
	N							

	Sig. (2-tailed)	.121	.305	.949	.003		.200	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.6	Pearson Correlation	.092	.332	.465**	.097	.229	1	.558**
	Sig. (2-tailed)	.611	.059	.006	.593	.200		.001
	N	30	30	30	30	30	30	30
Perencanaan Anggaran	Pearson Correlation	.735**	.814**	.635**	.697**	.541**	.558**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.001	.001	
	N	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	Lingkungan Birokrasi
X2.1	Pearson Correlation	1	.515**	.557**	.810**
	Sig. (2-tailed)		.002	.001	.000
	N	30	30	30	30
X2.2	Pearson Correlation	.515**	1	.557**	.759**
	Sig. (2-tailed)	.002		.001	.000
	N	30	30	30	30
X2.3	Pearson Correlation	.557**	.557**	1	.780**
	Sig. (2-tailed)	.001	.001		.000
	N	30	30	30	30
Lingkungan Birokrasi	Pearson Correlation	.810**	.759**	.780**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Penyerapan Anggaran
Y1	Pearson Correlation	1	.885**	.729**	.965**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30
Y2	Pearson Correlation	.885**	1	.564**	.906**
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.000
	N	30	30	30	30
Y3	Pearson Correlation	.729**	.564**	1	.840**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001		.000
	N	30	30	30	30
Penyerapan Anggaran	Pearson Correlation	.965**	.906**	.840**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.746	6

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.780	3

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.889	3